

## **B A B I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Memenuhi amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) ini merupakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Tujuan Penyusunan Perubahan Renja ini adalah acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan tahunan SKPD serta menyediakan indikator – indikator yang dijadikan tolak ukur dalam pencapaian kinerja.

#### **1.2. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Fungsi**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I tahun anggaran 2015, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah:

- (1) merumuskan rancangan program kegiatan dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun mendatang;
- (2) memberi arah dan petunjuk tentang tahapan-tahapan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Fungsi Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah sebagai pedoman Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di tahun 2015.

### **1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan**

Dasar Penyusunan Perubahanan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 adalah:

#### **A. Kegiatan Baru**

1. Proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPADS) telah masuk Program Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada tahun 2015, sebagai syarat penyusunannya adalah diperlukannya Naskah Akademik sebagai representasi Raperda LLPADS tersebut. Untuk maksud tersebut diperlukan suatu Kegiatan baru terkait penyusunan naskah Akademik tersebut yaitu **Kegiatan Penyusunan Perda tentan Lain-lain PAD Yang Sah** senilai Rp. 122.930.000, (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya bagi Bendahara Barang pada SKPD se Provinsi Kep Bangka Belitung, diperlukan kegiatan **Pembinaan Teknis Pengelolaan Aplikasi Bendahara/Penyimpan Barang Daerah** untuk menyusun Neraca Daerah di SKPD berbasis Aplikasi senilai Rp. 274.810.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Berkaitan telah diterapkannya Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual diperlukan **Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah/Asset Daerah** pada Tahun 2015 untuk menyediakan data yang Up To Date terhadap penghitungan kekayaan Daerah baik penambahan maupun penyusutannya. Kegiatan dimaksud bernilai Rp. 530.940.000,- (lima ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

4. Adanya penyusutan aset yang bernilai Rp 1, (satu rupiah) dan yang tidak mempunyai nilai sehingga harus dinilai kembali dalam rangka penyusunan neraca daerah tahun 2015, dalam perhitungan tersebut diperlukan kegiatan **Penilaian Barang Milik Daerah/Asset Daerah** senilai Rp. 399.450.000,- (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Dalam rangka penetapan Sitem dan Prosedur tentang Pengelolaan keuangan daerah agar sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperlukan **Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pengelolaan Keuangan Daerah** senilai Rp. 465.593.000,- (Empat ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
6. Dalam rangka evaluasi terhadap bantuan keuangan Ke Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 diperlukan kegiatan **Pemantauan dan Evaluasi Keuangan kabupaten/Kota** senilai Rp. 243.220.000,- (Dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)
7. Dalam rangka menciptakan keselarasan/kesesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan peraturan perundang-undangan diperlukan kegiatan **Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** tahun 2015 senilai Rp. 309.941.800,- (Tiga ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

## **B. Penambahan Anggaran**

1. Terdapat kekurangan dana dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap program dan kegiatan pembangunan pada kegiatan :
  - **Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD** senilai Rp. 26.228.000,- (dua puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah sehingga menjadi Rp. 379.116.000 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah
  - **Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD** sebesar Rp. 73.400.000,- (Tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.036.850.000,- (Satu milyar tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Belum adanya naskah akademik sebagai representasi Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga terjadinya penambahan anggaran pada kegiatan **Penyusunan Perda dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah** senilai Rp. 170.680.000,- (Seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 360.803.000,- (Tiga ratus enam puluh juta delapan ratus tiga ribu rupiah)
3. Belum terakomodirnya anggaran penunjang dan honorarium panitia kegiatan pelelangan umum kendaraan dinas pada Kegiatan **Penghapusan Barang-barang Inventaris** senilai Rp. 104.545.160,- (Seratus empat juta lima ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 222.068.320,- (Dua ratus dua puluh dua juta enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
4. Belum terakomodirnya Aplikasi pendukung Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berupa Aplikasi Intgrasi BAPPEDA-SIPKD, Aplikasi Integrasi Samsat-SIPKD, Aplikasi Integrasi Simda-SIPKD dan pelatihan terhadap admin dan operator aplikasi senilai Rp. 304.930.000,- (tiga ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) pada **Kegiatan Operasional Aplikasi SIPKD** sehingga menjadi Rp. 526.730.000,- (Lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
5. Sehubungan dengan naiknya Tarif Dasar Listrik dan Penggunaan air PDAM oleh UPTD kabupaten maka diperlukan penambahan pagu anggaran pada kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber daya air dan listrik** sebesar Rp. 202.350.000,- (Dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sehingga menjadi Rp. 978.403.670,- (Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu enam ratus tujuh rupiah).
6. Semakin tingginya tingkat pelayanan terhadap masyarakat menyebabkan meningkatnya kegiatan **Penyediaan Alat Tulis Kantor** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah sehingga menjadi sebesar Rp. 1.092.376.150,- (Satu milyar sembilan puluh

dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah)

7. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah** sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 846.000.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta rupiah)
8. Penambahan pagu anggaran pada kegiatan **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor** sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi satu milyar tiga ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)

### **C. Perubahan Nama dan Pergeseran Anggaran**

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru tentang pengenaan PKB dan BBNKB sehingga diperlukan penyesuaian Nama kegiatan yaitu **Kegiatan Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB tahun 2016** menjadi **Kegiatan Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB**.
2. Adanya penambahan dan pengurang kebutuhan terhadap dana dalam melaksanakan Kegiatan sehingga terjadi pergeseran anggaran diantaranya Kegiatan :
  - **Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah**
  - **Konsultasi/Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah**

## **BAB II**

### **EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I**

Pada tahun 2015, DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 1 (satu) urusan pemerintahan, yaitu Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, kepegawaian dan persandian.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan evaluasi hingga triwulan I tahun anggaran 2015, baik dalam hal pengelolaan pendapatan daerah maupun dalam melaksanakan prioritas program kegiatan.

## 2.1 Evaluasi Hasil Penerimaan Daerah Hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2015

Realisasi Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2015 mencapai 25.75 % dari target sebesar Rp. 569.582.243.796,50, Bagian Dana Perimbangan 28.56 % dari target sebesar Rp. 1.147.712.494.000,00, dan Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 25.00 % dari target sebesar Rp. 179.626.400.000,00, sementara penerimaan secara keseluruhan mencapai 50.11 % dari target tahapan yang seharusnya 27.38 %.

Adapun rincian Realisasi Penerimaan Daerah tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel II.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2015**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Kode Rekening	Jenis Pendapatan dan Pungutan	Target 2015	Realisasi sampai Triwulan I	Presentase Penerimaan
1	2	3	4	5
4.1	Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
4.1.1	Pajak Daerah	517.786.492.706,82	110.119.891.215,64	<b>21,27%</b>
4.1.2	Restribusi Daerah			
4.1.3	Hasil PMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.500.000.000,00	4.990.036.822,78	<b>66,53%</b>
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	44.295.751.089,69	31.544.422.905,16	<b>71,21%</b>
	<b>Jumlah Bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>569.582.243.796,51</b>	<b>146.654.350.943,58</b>	<b>25,75%</b>
4.2	Bagian Dana Perimbangan			
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	194.380.281.000,00	11.898.603.638,00	<b>6,12%</b>
4.2.2	Dana Alokasi Umum	897.887.443.000,00	299.295.804.000,00	<b>33,33%</b>
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	55.444.770.000,00	16.633.431.000,00	<b>30,00%</b>
	<b>Jumlah Bagian Dana Perimbangan</b>	<b>1.147.712.494.000,00</b>	<b>327.827.838.638,00</b>	<b>28,56%</b>
4.3	Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	179.626.400.000,00	44.906.600.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	179.626.400.000,00	44.906.600.000,00	
4.3.4.01.03	Dana BOS	179.626.400.000,00	44.906.600.000,00	<b>25,00%</b>
	<b>Jumlah Bagian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>179.626.400.000,00</b>	<b>44.906.600.000,00</b>	<b>25,00%</b>
	<b>JUMLAH TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>1.896.921.137.796,51</b>	<b>519.388.789.581,58</b>	<b>27,38%</b>

## **2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Hingga Triwulan I Tahun Anggaran 2015**

Dari jumlah program utama sebanyak 9 (sembilan) program pembangunan dengan jumlah kegiatan total sebanyak 61 (enam puluh satu) kegiatan, presentase pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sebesar 10.45 % dari 23.25 % target pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Tidak tercapainya target pelaksanaan program pembangunan dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Banyak Program dan Kegiatan yang baru dilaksanakan pada Medio Tahun Anggaran 2015;
2. Perubahan Sistem Aplikasi SIPKD berbasis Kas menjadi Aplikasi SIPKD berbasis Akrual yang masih dalam Tahap Asistensi terhadap penyempurnaan operasionalnya;

Tabel berikut ini menyajikan realisasi target program pembangunan yang dilaksanakan oleh DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga Triwulan I Tahun anggaran 2015.

**TABEL II.2**  
**EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2015**  
**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2017	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2014 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2015 (Tahun n)/sesuai DPA 2015	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan I Tahun 2015 (tahun n)		Capaian Target RPJMD S/d Triwulan II Tahun .... (tahun n)		SKPD Penanggung jawab
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	9 = (5+7)*	10 = (9/4)*	11
200501	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung	10.405.968.937	8.853.286.230	8.997.563.920	1.508.446.031	16,77%	10.361.732.261	99,57%	
2005010100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aktivitas pelayanan pengiriman surat menyurat dinas dan benda pos lainnya	375.570.932	155.137.387	226.800.000	13.310.000	5,87%	168.447.387	44,85%	
2005010200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin	722.796.888	729.957.279	903.000.000	248.446.391	27,51%	978.403.670	135,36%	
2005010700	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan administrasi keuangan yang baik	358.209.634	801.860.000	990.780.000	154.290.000	15,57%	956.150.000	266,92%	
2005010800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kualitas kerja aparatur Dinas PPKAD	1.863.823.897	1.880.083.750	180.000.000	30.666.797	17,04%	1.910.750.547	102,52%	







20	05	02	4100	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pemerintah, meningkatnya kinerja aparatur pemerintah, meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		155.536.000	159.840.000	-	0,00%	155.536.000	#DIV/0!	
20	05	02	9000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gudang Barang	-					-	#DIV/0!	
20	05	02	9964	Pembangunan Gudang Barang	Terlaksananya Pembangunan Gudang Barang	-	-	235.975.000	-	0,00%	-	#DIV/0!	
20	05	02	9965	Pengadaan Peralatan Kerja Pelayanan Samsat UPTD	Tersedianya Peralatan Kerja Pelayanan Samsat UPTD		430.577.000	1.214.455.000	11.116.000	0,92%	441.693.000	#DIV/0!	
20	05	02	0202	Pembangunan Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas pada 2 UPTD Kabupaten Pemekaran		747.831.000						
20	05	02	0903	Pengadaan Laptop di DPPKAD	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah		90.570.000						
20	05	02	0915	Pengadaan Peralatan Keamanan Kantor (CCTV dan Peralatan Penjaga Keamanan Kantor)	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, terpeliharanya keamanan gedung kantor		280.614.800						
20	05	02	0920	Pengadaan Stabilizer Gedung Kantor DPPKAD	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah		202.258.000						

20	05	02	1000	Pengadaan Meubelair	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah		435.022.250						
20	05	02	8600	Pengadaan Sumur Bor	Terlaksananya pembangunan sumur bor pada UPTD Kab Belitung Timur dan Belitung		117.705.400						
20	05	02	9925	Pengadaan Server Regident	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat		204.300.000						
20	05	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kedisiplinan aparatur pada DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>177.683.000</b>	<b>45.002.000</b>	<b>374.836.500</b>	-	<b>0,00%</b>	<b>45.002.000</b>	<b>#DIV/0!</b>	
20	05	03	0200	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas beserta perlengkapannya	177.683.000	45.002.000	355.000.000	-	0,00%	-	#DIV/0!	
20	05	03	2500	Fasilitasi dan advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Prov Kep Bangka Belitung	Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada DPPKAD Prov Kep Bangka Belitung	-	-	19.836.500	-	0,00%	-	#DIV/0!	
										#DIV/0!	-	#DIV/0!	
20	05	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung</b>	<b>1.451.518.750</b>	<b>1.438.299.500</b>	<b>1.707.758.240</b>	<b>197.277.100</b>	<b>11,55%</b>	<b>1.635.576.600</b>	<b>112,68%</b>	
20	05	05	2000	RAPAT KOORDINASI DAN INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Intensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan PAD	275.000.000							



20	05	05	9962	Koordinasi dan Konsultasi Restribusi dan Pendapatan Lain-lain	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Restribusi dan Pendapatan Lain-lain	-	-	98.342.000	1.140.000	1,16%	1.140.000	#DIV/0!	
20	05	05	9963	Rekonsialisasi Penerimaan Restribusi Daerah	Terlaksananya Rekonsialisasi Penerimaan Restribusi Daerah	-	-	37.720.000	-	0,00%	-	#DIV/0!	
20	05	05	9964	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Restribusi Perpanjangan MTA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Restribusi Perpanjangan MTA	-	-	268.102.400	33.234.400	12,40%	33.234.400	#DIV/0!	
20	05	05	9965	Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	112.752.800	-	0,00%	-	#DIV/0!	
20	05	05	9901	Bimbingan Teknis Operator Aplikasi SIPKD	Tercapainya peningkatan kualitas sumber daya operator aplikasi SIPKD		105.467.900						
20	05	05	9903	Bimbingan Teknis Penyusunan RKA SKPD	Tercapainya RKA yang tepat dan benar sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan didalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah		290.608.900						
20	05	05	9906	Rapat Koordinasi Pengelolaan Restribusi	Terlaksananya Rakor restribusi		48.440.000						
20	05	05	9907	Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	Tercapainya target penerimaan pajak daerah	482.402.250	464.886.500						

20	05	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menyediakan informasi keuangan</b>	70.720.650	144.107.500	68.485.220	-	0,00%	144.107.500	203,77%	
20	05	06	0200	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya informasi keuangan Semester	70.720.650	50.150.000	68.485.220	-	0,00%	50.150.000	70,91%	
20	05	06	5900	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tersedianya laporan keuangan daerah yang sesuai SAP		30.425.000						
20	05	06	6200	Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Barang Dana APBN	Tersedianya informasi keuangan dan barang hasil pelaksanaan dana dekonsentrasi		63.532.500						
20	05	16		<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Meningkatnya Asset Milik Daerah</b>	-	-	399.717.500	-	0,00%	-	#DIV/0!	
20	05	16	1300	Pengadaan Lahan di Samsat Bangka Selatan	Meningkatnya Kuantitas Asset Tetap Daerah	-	-	399.717.500	-	0,00%	-	#DIV/0!	
20	05	17		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur dalam bidang keuangan dan pendapatan</b>	2.758.853.600	3.071.054.982	4.317.614.320	686.315.750	15,90%	3.757.370.732	136,19%	
20	05	17	0600	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Penetapan Perda dan Pergub tentang Perubahan APBD 2015 dan APBD 2016	990.000.000	819.953.400	963.450.000	178.024.000	18,48%	997.977.400	100,81%	
20	05	17	1000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014		178.100.000	294.157.000	178.024.000	60,52%	356.124.000	#DIV/0!	

20	05	17	1900	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	482.402.250		691.350.000	95.673.900	13,84%	95.673.900	19,83%	
20	05	17	3200	Operasional Aplikasi SIPKD	Terlaksananya Operasional Aplikasi SIPKD Modul Core	550.000.000	488.512.233	221.800.000	22.400.000	10,10%	510.912.233	92,89%	
20	05	17	3300	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	Meningkatnya kinerja Bendahara pengeluaran dan PPK SKPD dalam pencairan dana dan penggunaan dana	221.441.880	163.277.400	190.990.000	73.903.899	38,70%	237.181.299	107,11%	
20	05	17	3500	Penghapusan Barang-barang Inventaris	Terlaksananya Penghapusan Barang-barang Inventaris	97.304.269	115.526.400	117.523.160	16.143.000	13,74%	131.669.400	135,32%	
20	05	17	4000	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016	Tersusunnya rencana kerja dan anggaran SKPD yang mengacu pada ketentuan MENDAGRI	175.021.000	155.502.100	309.941.800	-	0,00%	155.502.100	88,85%	
20	05	17	5200	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah yang akuntabel	-	116.971.800	115.180.000	240.000	0,21%	117.211.800	#DIV/0!	
20	05	17	3400	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	137.325.266	111.749.200	169.893.200	34.374.350	20,23%	146.123.550	106,41%	
20	05	17	6700	Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D	Terpeliharanya arsip SP2D yang diterbitkan BUD /Kuasa BUD beserta dokumen pendukungnya	-	73.400.000	168.135.000	1.833.000	1,09%	75.233.000	#DIV/0!	
20	05	17	7300	Pembinaan Teknis Bendahara/ Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	Terlaksananya Pembinaan Teknis Bendahara barang dan Pengurus Barang	105.358.935	-	184.786.760	-	0,00%	-	0,00%	





20	05	18		<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>pengevaluasian raperda kab/kota tentang APBD dan pertanggungjawaban realisasi APBD Kab/Kota</b>	<b>284.558.560</b>	<b>508.202.700</b>	<b>663.898.280</b>	<b>5.660.000</b>	<b>0,85%</b>	<b>513.862.700</b>	<b>180,58%</b>	
20	05	18	0100	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan PAPBD	Keputusan Gubernur tentang evaluasi raperda dan Raperkada tentang APBD dan PAPBD	192.500.000	225.844.000	352.888.000	5.660.000	1,60%	231.504.000	120,26%	
20	05	18	0600	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Raperda tentang Pertanggung jawaban APBD	92.058.560	67.550.000	96.270.280	-	0,00%	67.550.000	73,38%	
20	05	18	0800	Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		-	214.740.000	-	0,00%	-	#DIV/0!	
20	05	18	0701	Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kab/Kota	Pelaksanaan bantuan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan		214.808.700	-	-				
20	05	50		<b>Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang akan membuat pendapatan di bidang pajak daerah meningkat setiap tahunnya</b>	<b>272.585.500</b>	<b>352.109.000</b>	<b>2.107.658.872</b>	<b>55.080.250</b>	<b>2,61%</b>	<b>407.189.250</b>	<b>149,38%</b>	
20	05	50	0100	Razia PKB dan BBN-KB Roda 2 dan roda 4	Terlaksananya razia PKB dan BBN KB dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD	-	-	466.567.200	-	0,00%	-	#DIV/0!	

20	05	50	0300	Sosialisasi Perda Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi perda pajak daerah	272.585.500		52.280.000	-	0,00%	-	0,00%	
20	05	50	0500	Operasional dan Pemeliharaan Sistem informasi Pajak Daerah	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Sistem informasi Pajak Daerah yang lebih baik			1.138.471.672	11.642.000	1,02%	11.642.000	#DIV/0!	
20	05	50	0700	Operasional Samsat Keliling	Penambahan PAD dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak		144.272.000	356.900.000	43.438.250	12,17%	187.710.250	#DIV/0!	
20	05	50	1100	Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2016	Tercapainya target PKB dan BBNKB		-	93.440.000	-	0,00%	-	#DIV/0!	
20	05	50	0500	Operasional Sistem Informasi Samsat Online	Terpenuhinya operasional Sistem Informasi Samsat yang lebih baik		120.881.200						
20	05	50	1000	Sosialisasi PKB dan BBNKB atas Alat Berat/besar	Meningkatnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak alat besar/berat		86.955.800						
					<b>JUMLAH</b>	<b>17.727.114.447</b>	<b>21.296.677.374</b>	<b>26.422.044.352</b>	<b>2.760.954.977</b>	<b>10,45%</b>	<b>24.057.632.351</b>	<b>135,71%</b>	

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Pada tahap yang ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu RPJMN 2015 – 2019, pembangunan ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

RKP 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan RPJMN ketiga yang merupakan transisi dari RPJMN kedua khususnya RKP 2014. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuang dalam RKP 2014 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2015.

Dalam isu strategis ke-9 Pembangunan Jangka Panjang Nasional yaitu **“Reformasi Keuangan Negara”** sasaran yang ingin di capai adalah meningkatkan kemampuan keuangan negara dan meningkatnya kualitas belanja negara yang ditandai dengan :

- a. meningkatnya penerimaan negara yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai;
- b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara.

#### **Arah Kebijakan dan Strategi**

##### **A. Peningkatan Penerimaan Negara**

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dan penerimaan bea dan cukai dalam rangka pembiayaan pembangunan, pengendalian defisit dan menjaga kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*).

Strategi pembangunan yang akan ditempuh adalah :

- (i) Reformasi Perpajakan Secara Komprehensif antara lain melalui : penambahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak minimal 5.000 (lima ribu) orang pegawai per tahun selama 5 (lima) tahun, penambahan 27 (dua puluh tujuh) satuan kerja baru berupa 2 (dua) Kantor Wilayah dan 25 (dua puluh lima ) Kantor Pelayanan Pajak, penambahan 244 (dua ratus empat puluh empat) Seksi Pengawas dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak; pembenahan sistem administarsi perpajakan, penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak

hasil pemeriksaan; ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tariff; peningkatan efektivitas penyuluhan; penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat; peningkatan efektivitas pengawasan; dan peningkatan efektivitas penegakkan hukum bagi penyelundup pajak (*tax evasion*);

- (ii) Optimalisasi Penerimaan Bea dan Cukai antara lain melalui : penguatan *legal framework* melalui penyelesaian/ penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa; peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai; pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang meliputi program profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), persiapan *Authorized Economic Operator (AEO)* dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS); serta ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai.

## **B. Peningkatan Kualitas Belanja Negara**

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Dengan strategi pembangunan yang akan ditempuh antara lain :

- (i) Penyempurnaan Perencanaan Penganggaran Negara antara lain melalui : pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran Kementerian/Lembaga; rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran; pemantapan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk meningkatkan disiplin dan kepastian fiskal serta penataan remunerasi aparatur negara dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- (ii) Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Anggaran antara lain melalui : penyempurnaan dan perbaikan regulasi terkait penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program untuk mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah; pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui *Treasury Single Account* dan *cash forecasting* yang handal, serta manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara; dan modernisasi kontrol dan

monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi; (iii) Peningkatan Pengelolaan Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah, antara lain melalui percepatan pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, serta pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi DAK.

Dalam rangka mendukung program pembangunan Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015 yang bertemakan **“Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”**, Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 disusun dengan mencermati perolehan keberhasilan pembangunan medio tahun 2014 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun 2015.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan tersebut di atas, ditetapkan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, yaitu :

1. Mengembangkan *one village one product* (OVOP) dan koperasi komoditi;
2. Penguatan *rural urban linkages*;
3. Pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Rehabilitasi lahan kritis dan lahan bekas tambang;
6. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
7. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur;
8. Peningkatan pendidikan wajib belajar 12 tahun;
9. Peningkatan pelayanan kesehatan;
10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
11. Pemberdayaan budaya lokal dan destinasi wisata;
12. Pengendalian pemanfaatan ruang;
13. Program SATAM EMAS;

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015**

Dalam rangka melaksanakan fungsi DPPKAD sebagai Perumus kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset

daerah, Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten/kota di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah, Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dan Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) serta Pelaksanaan urusan kesekretariatan diperlukan suatu Perencanaan Kerja yang baik dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berkualitas.

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai beberapa tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya :

1. Masalah yang bersifat internal
  - a. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  - b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan, terutama Sistem Pajak On Line yang belum berjalan maksimal.
  - c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas.
2. Masalah yang bersifat eksternal
  - a. Belum dipahami secara baik tentang proses dan mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD yang ada di pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  - b. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur DPPKAD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
  - c. Ketersediaan Anggaran didalam memfasilitasi program kerja DPPKAD

Tabel III.1  
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung Tahun 2015

<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1.	Meningkatkan kualitas aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur	Aparatur memahami dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi DPPKAD	Orang/hari	Jumlah Peserta melaksanakan Bimtek
			Aparatur mengerti tentang tugas pokok dan fungsi DPPKAD	Orang/hari	Persentase Pegawai melaksanakan Bimtek
2.	Meningkatkan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendapatan Daerah	Rupiah/Tahun	Jumlah Pendapatan dalam Tahun
			Analisis data yang digunakan dalam kebijakan daerah	Angka/Tahun	Persentase Jumlah kebijakan pertahun
			Pemanfaatan teknologi informasi dan SIM dalam sistem pengelolaan keuangan daerah	Angka/Tahun	Persentase Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek
3.	Meningkatkan Sistem pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Sistem pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Rupiah/tahun	Persentase Laporan Keuangan Daerah



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
4.	Meningkatkan Sistem pengelolaan asset daerah	Tersedianya Sistem pengelolaan asset daerah	Tersedianya sistem pengelolaan asset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Barang/ Tahun	Jumlah Asset Barang Milik Daerah
5.	Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD	Tercapainya pelaksanaan APBD dengan baik	Capaian kegiatan pembangunan yang terlaksana sesuai rencana	Perda/ tahun	Jumlah Perda yang disahkan

### **3.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD**

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut DPPKAD provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merencanakan perubahan terhadap Program pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Tahun Anggaran 2015.

Dari 9 (sembilan) Program Utama, terdapat 5 (lima) program pembangunan yang mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meningkat sebesar 7.81 % dari Pagu Dana sebesar Rp. 8.997.563.920,00 (Delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp. 9.699.913.920,00 (Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meningkat sebesar 3.85 % dari Pagu Dana sebesar Rp. 7.784.511.500,00 (Tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) menjadi Rp. 8.084.511.500,00 (Delapan milyar delapan puluh empat juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur meningkat sebesar 24.88 % dari Pagu Dana sebesar Rp. 1.707.758.240,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp. 2.132.568.240,00 (Dua milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah meningkat sebesar 57.49 % dari Pagu Dana sebesar Rp. 4.317.614.320,00 (Empat milyar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus empat belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) menjadi Rp. 6.800.024.280,00 (Enam milyar delapan ratus juta dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota meningkat sebesar 40.59 % dari Pagu Dana sebesar Rp. 663.898.280,00 (enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp. 933.346.280,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
6. Program Peningkatan Penerimaan Pajak menurun sebesar 56.90 % dari Pagu Dana sebesar Rp. 1.370.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) menjadi Rp. 590.410.000,00 (Lima ratus sembilan puluh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Tabel berikut menyajikan rincian Perubahan Program/Kegiatan pada DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014.

**Tabel III.2**  
**RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran Tahun 2015				Perubahan Anggaran Tahun 2015		Bertambah/ Berkurang	Persentase
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1				2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
20	05	01		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung</b>			<b>8.997.563.920</b>			<b>9.699.913.920</b>	<b>702.350.000</b>	<b>7,81%</b>
20	05	01	0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aktivitas pelayanan pengiriman surat menyurat dinas dan benda pos lainnya	Pangkalpinang dan 7 UPTD	12 Bulan	226.800.000	APBD Provinsi	12 Bulan	226.800.000	-	
20	05	01	0200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelancaran pelaksanaan tugas rutin	Pangkalpinang dan 7 UPTD	12 Bulan	903.000.000	APBD Provinsi	12 Bulan	1.105.350.000	202.350.000	22,41%
20	05	01	0700	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengelolaan administrasi keuangan yang baik	Pangkalpinang dan 7 UPTD	12 Bulan	990.780.000	APBD Provinsi	12 Bulan	990.780.000	-	



20	05	01	1800	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah	Pangkalpinang dan 7 UPTD	12 Bulan	546.000.000	APBD Provinsi	12 Bulan	846.000.000	300.000.000	54,95%
20	05	01	1900	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Optimalnya pelayanan tugas sehari-hari	Pangkalpinang dan 7 UPTD	12 Bulan	2.447.250.000	APBD Provinsi	12 Bulan	2.447.250.000	-	
20	05	01	3500	Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung	Terwujudnya pembayaran gaji PNS yang tepat waktu	Pangkalpinang dan 7 UPTD	12 Bulan	85.307.920	APBD Provinsi	12 Bulan	85.307.920	-	
<b>20</b>	<b>05</b>	<b>02</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Aktivitas Perkantoran baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga tercapainya pelayanan yang baik kepada masyarakat</b>			<b>7.784.511.500</b>			<b>8.084.511.500</b>	<b>300.000.000</b>	<b>3,85%</b>
20	05	02	0305	Pembangunan Gedung musholla	Terlaksananya Pembangunan Gudang Arsip, Ruang Kerja	Belitung dan Belitung Timur	2 unit	691.906.000	APBD Provinsi	2 unit	691.906.000	-	
20	05	02	0337	PEMBANGUNAN LANDSCAPE DAN PAGAR KANTOR UPTD/SAMSAT KOTA PANGKALPINANG	Terlaksananya Pembangunan Landscape dan Pagar Kantor UPTD/Samsat Kota Pangkalpinang	Belitung	1 paket	1.033.803.000	APBD Provinsi	1 paket	1.033.803.000	-	
20	05	02	0500	Pengadaan Kendaraan Dinas	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah	Pangkalpinang	2 unit	986.230.000	APBD Provinsi	2 unit	986.230.000	-	

20	05	02	0700	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR	Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah	Pangkalpinang	14 unit	181.190.000	APBD Provinsi	14 unit	181.190.000		
20	05	02	1200	Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Pangkalpinang dan Bangka	2 unit	224.880.000	APBD Provinsi	2 unit	224.880.000	-	
20	05	02	2200	Pemeliharaan/Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya pertamanan dan gedung kantor	Pangkalpinang dan 7 UPTD	12 bulan	1.002.792.500	APBD Provinsi	12 bulan	1.302.792.500	300.000.000	29,92%
20	05	02	2400	Pemeliharaan/Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional, Meningkatnya Kinerja aparatur Pemerintah	Pangkalpinang dan 7 UPTD	12 bulan	2.053.440.000	APBD Provinsi	12 bulan	2.053.440.000	-	
20	05	02	4100	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pemerintah, meningkatnya kinerja aparatur pemerintah, meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Bangka	1 unit	159.840.000	APBD Provinsi	1 unit	159.840.000	-	
20	05	02	9000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya Pembangunan Gudang Barang	Pangkalpinang			APBD Provinsi				

20	05	02	9964	Pembangunan Gudang Barang	Terlaksananya Pembangunan Gudang Barang	Pangkalpinang	1 unit	235.975.000	APBD Provinsi	1 unit	235.975.000	-	
20	05	02	9965	Pengadaan Peralatan Kerja Pelayanan Samsat UPTD	Tersedianya Peralatan Kerja Pelayanan Samsat UPTD	Pangkalpinang	88 unit	1.214.455.000	APBD Provinsi	88 unit	1.214.455.000	-	
<b>20</b>	<b>05</b>	<b>03</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang peningkatan kedisiplinan aparatur pada DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	-		<b>374.836.500</b>			<b>374.836.500</b>	-	<b>0,00%</b>
20	05	03	0200	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinasbeserta perlengkapannya	Pangkalpinang	760 stel	355.000.000	APBD Provinsi	760 stel	355.000.000	-	
20	05	03	2500	Fasilitasi dan advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Prov Kep Bangka Belitung	Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada DPPKAD Prov Kep bangka Belitung	Pangkalpinang	5 buku laporan	19.836.500	APBD Provinsi	5 buku laporan	19.836.500	-	
<b>20</b>	<b>05</b>	<b>05</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>meningkatnya kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pada DPPKAD Provinsi Kep Bangka Belitung</b>			<b>1.707.758.240</b>			<b>2.132.568.240</b>	<b>424.810.000</b>	<b>24,88%</b>
20	05	05	2000	RAPAT KOORDINASI DAN INTENSIFIKASI SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Intensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah dalam upaya meningkatkan PAD								

20	05	05	0300	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah	Pangkalpinang	25 orang	163.800.000	APBD Provinsi	25 orang	163.800.000	-	
20	05	05	3300	Rakor PKB dan BBN-KB dengan Instansi Tekait (Kepolisian, Jasa Rahardja dan ATPM (Dealer) dll)	Terlaksananya Rakor PKB dan BBN-KB untuk meningkatkan kualitas aparatur	Prov Kep Bangka Belitung	3 kali	161.844.000	APBD Provinsi	3 kali	161.844.000	-	
20	05	05	9100	Pembinaan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Keuangan di UPTD serta Koordinasi dan Konsultasi dengan Kabupaten/Kota	Optimalnya pelayanan tugas sehari-hari	Pangkalpinang dan 7 UPTD	12 bulan	425.000.000	APBD Provinsi	12 bulan	575.000.000	150.000.000	35,29%
20	05	05	9905	Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi	Tercapainya target penerimaan restribusi	Prov Kep Bangka Belitung	100%	104.559.000	APBD Provinsi	100%	104.559.000	-	
20	05	05	9956	Konsultasi/Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas suber daya aparatur perpajakan	Luar Daerah	100%	142.236.000	APBD Provinsi	100%	142.236.000	-	
20	05	05	9957	Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3)	Prov Kep Bangka Belitung	100%	107.849.000	APBD Provinsi	100%	107.849.000	-	



20	05	05	9961	Rakor Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan Kab/Kota	Terlaksananya Rakor Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan kab/Kota	Prov Kep Bangka Belitung	1 kali	85.553.040	APBD Provinsi	1 kali	85.553.040	-	
20	05	05	9962	Koordinasi dan Konsultasi Restribusi dan Pendapatan Lain-lain	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Restribusi dan Pendapatan Lain-lain	Prov Kep Bangka Belitung	100%	98.342.000	APBD Provinsi	100%	98.342.000	-	
20	05	05	9963	Rekonsialisasi Penerimaan Restribusi Daerah	Terlaksananya Rekonsialisasi Penerimaan Restribusi Daerah	Prov Kep Bangka Belitung	100%	37.720.000	APBD Provinsi	100%	37.720.000	-	
20	05	05	9964	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Restribusi Perpanjangan MTA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Restribusi Perpanjangan MTA	Pangkalpinang	100%	268.102.400	APBD Provinsi	100%	268.102.400	-	
20	05	05	9965	Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur Tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Prov Kep Bangka Belitung	1 kali	112.752.800	APBD Provinsi	1 kali	112.752.800	-	

				Pembinaan Teknis Pengelolaan Aplikasi Bendahara/ Penyimpan Barang dan Pengurus Barang**	Terlaksananya Pembinaan Teknis Pengelolaan Aplikasi Bendahara/ Penyimpan Barang dan Pengurus Barang			-	APBD Provinsi	3 x 100 orang	274.810.000	274.810.000	100,00%
<b>20</b>	<b>05</b>	<b>06</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Meningkat nya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat menyediakan informasi keuangan</b>			<b>68.485.220</b>			<b>68.485.220</b>	-	<b>0,00%</b>
20	05	06	0200	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersedianya informasi keuangan Semester	Prov Kep Bangka Belitung	1 laporan	68.485.220	APBD Provinsi	1 laporan	68.485.220	-	
<b>20</b>	<b>05</b>	<b>16</b>		<b>Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Meningkatnya Asset Milik Daerah</b>			<b>399.717.500</b>			<b>399.717.500</b>	-	<b>0,00%</b>
20	05	16	1300	Pengadaan Lahan di Samsat bangka Selatan	Meningkatnya Kuantitas Asset Tetap Daerah	Bangka Selatan	100%	399.717.500	APBD Provinsi	100%	399.717.500	-	
<b>20</b>	<b>05</b>	<b>17</b>		<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Meningkatnya kinerja aparatur dalam bidang keuangan dan pendapatan</b>	-		<b>4.317.614.320</b>			<b>6.800.024.280</b>	<b>2.482.409.9960</b>	<b>57,49%</b>

20	05	17	0600	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	Penetapan Perda dan Pergub tentang Perubahan APBD 2015 dan APBD 2016	Prov Kep Bangka Belitung	2 perda	963.450.000	APBD Provinsi	2 perda	1.036.850.000	73.400.000	7,62%
20	05	17	1000	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Perda dan Pergub tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2014	Prov Kep Bangka Belitung	1 laporan	294.157.000	APBD Provinsi	1 laporan	294.157.000	-	
20	05	17	1900	Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Pemungutan Pajak Daerah	Pangkalpinang dan 7 UPTD	517.786.492.706,82	691.350.000	APBD Provinsi	500.844.014.371,82	691.350.000	-	
20	05	17	3200	Operasional Aplikasi SIPKD	Terlaksananya Operasional Aplikasi SIPKD Modul Core	Prov Kep Bangka Belitung	100%	221.800.000	APBD Provinsi	100%	526.730.000	304.930.000	137,48%
20	05	17	3300	Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD	Meningkatnya kinerja Bendahara pengeluaran dan PPK SKPD dalam pencairan dana dan penggunaan dana	Prov Kep Bangka Belitung	2 x 120 Orang	190.990.000	APBD Provinsi	2 x 120 Orang	190.990.000	-	
20	05	17	3500	Penghapusan Barang-barang Inventaris	Terlaksananya Penghapusan Barang-barang Inventaris	Prov Kep Bangka Belitung	100%	117.523.160	APBD Provinsi	100%	222.068.320	104.545.160	88,96%

20	05	17	4000	Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016	Tersusunnya rencana kerja dan anggaran SKPD yang mengacu pada ketentuan MENDAGRI	Prov Kep Bangka Belitung	1 kali	309.941.800	APBD Provinsi	1 kali	309.941.800	-	
20	05	17	5200	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan barang milik daerah yang akuntabel	Prov Kep Bangka Belitung	100%	115.180.000	APBD Provinsi	100%	115.180.000	-	
20	05	17	3400	Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Prov Kep Bangka Belitung	1 keputusan	169.893.200	APBD Provinsi	1 keputusan	169.893.200	-	
20	05	17	6700	Penyusunan dan Penataan Arsip SP2D	Terpeliharanya arsip SP2D yang diterbitkan BUD /Kuasa BUD beserta dokumen pendukungnya	Pangkalpinang	500 buku	168.135.000	APBD Provinsi	500 buku	168.135.000	-	
20	05	17	7300	Pembinaan Teknis Bendahara/ Penyimpan Barang dan Pengurus Barang	Terlaksananya Pembinaan Teknis Bendahara barang dan Pengurus Barang	Pangkalpinang	2 x 87 orang	184.786.760	APBD Provinsi	2 x 87 orang	184.786.760	-	
20	05	17	7400	Monitoring atau Pengawasan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah	Terlaksananya Monitoring atau Pengawasan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah	Prov Kep Bangka Belitung	100%	316.961.400	APBD Provinsi	100%	316.961.400	-	
20	05	17	7500	Penyusunan Revisi Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Perda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah	Prov Kep Bangka Belitung	100 buku	383.323.000	APBD Provinsi	100 buku	383.323.000	-	



20	05	18		<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	<b>pengevaluasian raperda kab/kota tentang APBD dan pertanggungjawaban realisasi APBD Kab/Kota</b>			<b>663.898.280</b>			<b>933.346.280</b>	<b>269.448.000</b>	<b>40,59%</b>
20	05	18	0100	Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD dan PAPBD	Keputusan Gubernur tentang evaluasi raperda dan Raperkada tentang APBD dan PAPBD	Prov Kep Bangka Belitung	7 kab/kota	352.888.000	APBD Provinsi	7 kab/kota	379.116.000	26.228.000	7,43%
20	05	18	0600	Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	Penetapan Raperda tentang Pertanggung jawaban APBD	Prov Kep Bangka Belitung	7 keputusan	96.270.280	APBD Provinsi	7 keputusan	96.270.280	-	
20	05	18	0800	Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Prov Kep Bangka Belitung	7 Kab/kota	214.740.000	APBD Provinsi	7 Kab/kota	214.740.000	-	
20	05	18	0701	Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kab/Kota	Pelaksanaan bantuan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			-	APBD Provinsi	7 Kab/kota	243.220.000	243.220.000	100,00%
20	05	50		<b>Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah</b>	<b>membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang akan membuat pendapatan di bidang pajak daerah meningkat setiap tahunnya</b>			<b>2.107.658.872</b>			<b>2.107.658.872</b>	-	<b>0,00%</b>

20	05	50	0100	Razia PKB dan BBN-KB Roda 2 dan roda 4	Terlaksananya razia PKB dan BBN KB dalam upaya meningkatkan penerimaan PAD	Prov Kep Bangka Belitung	7 UPTD	466.567.200	APBD Provinsi	7 UPTD	466.567.200	-	
20	05	50	0300	Sosialisasi Perda Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi perda pajak daerah	Prov Kep Bangka Belitung	100%	52.280.000	APBD Provinsi	100%	52.280.000	-	
20	05	50	0500	Operasional dan Pemeliharaan Sistem informasi Pajak Daerah	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Sistem informasi Pajak Daerah yang lebih baik	Prov Kep Bangka Belitung dan Luar Daerah	12 bulan	1.138.471.672	APBD Provinsi	12 bulan	1.138.471.672	-	
20	05	50	0700	Operasional Samsat Keliling	Penambahan PAD dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak	Prov Kep Bangka Belitung	12 bulan	356.900.000	APBD Provinsi	12 bulan	356.900.000	-	
20	05	50	1100	Penyusunan Pergub tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2016	Tercapainya target PKB dan BBNKB	Prov Kep Bangka Belitung dan Luar Daerah	1 pergub	93.440.000	APBD Provinsi	1 pergub	93.440.000	-	
								<b>26.422.044.352</b>			<b>30.601.062.312</b>	<b>4.179.017.960</b>	<b>15,82%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berupaya maksimal dalam melaksanakan Program/Kegiatan sebagaimana telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan telah dilaksanakan oleh DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diuraikan dalam Bab sebelumnya. Berdasarkan evaluasi tersebut DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyusun Perubahan Rencana Kerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2015.

Pangkalpinang, Mei 2015

**KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Drs. YULIZAR ADNAN, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630717 198903 1 009**